

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PRAKTIK PENGUPAHAN ANAK BUAH KAPAL (ABK)
TANPA KETENTUAN**

**(Studi pada Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten
Tanggamus)**

SKRIPSI

**RISKA ANGGRAINI
NPM :1721030386**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PRAKTIK PENGUPAHAN ABK TANPA KETENTUAN**
(Studi pada Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten
Tanggamus)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh

RISKA ANGGRAINI

NPM :1721030386

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H.

Pembimbing II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

ABSTRAK

Pelaksanaan praktik pengupahan yang dilakukan pemilik dengan anak buah kapal (ABK) pada Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, pada praktiknya tidak ada ketentuan mengenai nominal upah, lamanya waktu bekerja, serta hak dan kewajiban pekerja. Praktik pengupahan seperti ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Wayjelai. Pada kasus ini pengupahan dilakukan oleh dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemberi upah/pemilik kapal (*mu'ajir*) dan pihak kedua penerima upah/anak buah kapal (*musta'jir*). Dalam hal ini *mu'ajir* menawarkan pekerjaan kepada *musta'jir* untuk bekerja dikapal milik *mu'ajir*, namun sejak menjalin kerjasama pengupahan *mu'ajir* tidak ada ketentuan nominal upah yang harus diberikan. Upah yang diterima ABK pun tidak menentu setiap kerjanya dan tidak jarang terjadi penundaan pembayaran upah. Tentunya hal ini dapat merugikan salah satu pihak yaitu *musta'jir*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pengupahan ABK dan bagaimana hukum ekonomi Syariah tentang praktik pengupahan ABK pada Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi Syariah tentang praktik pengupahan ABK tanpa ketentuan pada Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data penelitian ini diperoleh dari Desa Wayjelai yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dan diperkaya dengan data kespustakaannya mempelajari, memahami buku-buku, jurnal serta tulisan cendekiawan yang berkaitan dengan objek penelitian, menggunakan metode kualitatif, setelah data terkumpul maka peneliti melakukan analisis kualitatif, dengan menggunakan metode cara berfikir deduktif, sampel yang diambil sebanyak 7 orang yang terdiri dari pemilik kapal, dan 6 orang anak buah kapal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa dalam praktik pengupahannya tidak ada ketentuan mengenai nominal upah yang harus diterima anak buah kapal, dan terkadang terjadi penundaan pembayaran. Pemberian upah sesuai dengan kehendak pemilik kapal/juragan. berdasarkan hukum ekonomi Syariah, hal ini tidak dibenarkan, sebab dalam praktik pengupahan yang terjadi di Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, tidak terpenuhinya rukun dan syarat *ujrah* yaitu harus menetapkan atau harus ada kesepakatan jumlah upah yang harus dibayarkan pemilik kepada anak buah kapal.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riska Anggraini

NPM : 1721030386

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK PENGUPAHAN ABK TANPA KETENTUAN (Studi pada Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada menyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 24 Februari 2021

Penulis



Riska Anggraini

NPM. 1721030184



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp: (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
SISTEM PENGUPAHAN ABK TANPA KETETAPAN
(Studi Pada Dermaga II Desa Wayelai Kecamatan
Kotaagung Kabupaten Tanggamus)**

Nama : Riska Anggraini

NPM : 1721030386

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. A Kurnedi Ja'far, S.Ag. M.H

NIP. 197208262003121002

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag.

NIP. 197504282007101003

**Ketua
Jurusan Mu'amalah**

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl.Letkol. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp: (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK PENGUPAHAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) TANPA KETENTUAN ”** (Studi Pada Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus) disusun oleh, Riska Anggraini, NPM: 1721030386, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis/01 April 2021

TIM PENGUJI

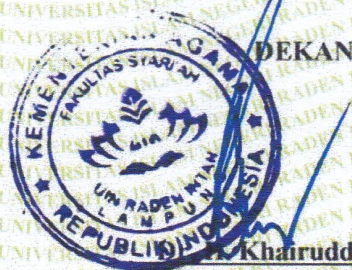
Ketua : Khoiruddin, M.S.I.

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.

Penguji Utama : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H.

Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag.



Khairuddin, M.H.
NIP.196210221993031002

MOTTO

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَخَذَ رِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْذَنَ جَرَّاجِيْرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)

“Dari Abu Sa’id Al Khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, Barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya
(H.R Abdurrazaq)”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang maha Esa, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu skripsi ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormatku tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda tercinta Juntaris dan Ibunda Aryanah yang telah membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, penuh kesabaran dan senantiasa selalu berdoa tulus ikhlas demi tercapainya cita-citaku, semoga Allah senantiasa memberikan nikmatnya kepada Ayah dan Ibu.
2. Kakakku dan adik-adikku serta pamanku Hendi yang selalu memberi motivasi, semangat, dan dukungan kepadaku demi terwujudnya keberhasilanku.
3. Uwakku Ibu Siti Maimunah dan Papi Rodi serta sepupu-sepupuku tercinta yang telah memberikan semangat motivasi dan juga sebagai rumah keduku.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang sangat saya banggakan dan saya jaga nama baiknya.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Riska Anggraini. Putri kedua dari bapak Juntaris dan Ibu Aryanah. Dilahirkan pada tanggal 30 November 1997 di Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Adapun Pendidikan yang telah dicapai sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Pasar Madang Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus lulus pada tahun 2010
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs N) Kotaagung Kabupaten Tanggamus lulus pada tahun 2013
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kotaagung Kabupaten Tanggamus lulus pada tahun 2016
4. Selanjutnya pada tahun 2017 mengikuti pendidikan program Strata satu (S1) pada Fakultas Sya'riah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Bandar lampung, 26 Februari 2021

Riska Anggraini
NPM. 1721030386

KATA PENGANTAR

Bismilla hirohmanirrohim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik pengupahan anak buah kapal (ABK) tanpa ketentuan (Studi pada Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus), ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat serta para pengikut beliau.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor Uin Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Bapak Dr. KH. Khoiruddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Sya'riah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa dan mahasiswi;
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;

4. Bapak Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag. M.H. selaku pembimbing I dan bapak Dr. Ghandi Liyorba Indra, M. Ag. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Dosen-dosen Fakultas Sya'riah dan segenap Tenaga Kependidikan UIN Raden Intan Lampung;
6. Kepala kepastakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain;
7. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Syariah khususnya Muamalah C 2017 yang telah membantu penulisan baik tenaga, motivasi semangat untuk penyelesaian skripsi ini;
8. Teman-teman KKN, PPS dan seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan serta kesan terbaik selama berada di Kampus UIN Raden Intan Lampung;
9. Sahabat-sahabatku, Elin Dwi Pristiana, Salsabilla Safitri, Pebi Puspitasari, Shynthya Aishyah Elsylianno. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi, serta semangat dan perhatian yang sangat luar biasa yang kalian berikan kepada penulis;
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki. Oleh karena itu untuk kiranya dapat

memberikan masukan dan saran-saran sehingga laporan penelitian ini akan lebih baik dan sempurna.

Bandar lampung, 26 Februari 2021

Riska Anggraini
NPM. 1721030386



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam tentang Upah (<i>Ujrah</i>)	23
1. Definisi Upah dalam Islam.....	23
2. Dasar Hukum Upah (<i>Ujrah</i>).....	29
3. Rukun Dan Syarat Upah (<i>Ujrah</i>)	33
4. Macam-Macam Upah (<i>Ujrah</i>)	39
5. Prinsip-Prinsip Upah (<i>Ujrah</i>).....	43
6. Jenis-jenis Pengupahan	47
7. System Pengupahan	49
8. Tingkatan Dalam Pemberian Upah	51
9. Hak Dan Kewajiban Pekerja	54
10. Berakhirnya Upah (<i>Ujrah</i>)	55
B. Upah Dalam Ekonomi Syariah	56
C. Anak Buah Kapal.....	61

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	64
1. Gambaran Umum Dermaga II	64
2. Visi dan misi Dermaga II	65
3. Struktur Organisasi Dermaga II	65
4. Keadaan Geografis Desa Wayjelai	66
5. Keadaan Topografi dan Luas Wilayah	66
6. Keadaan penduduk	66
7. Agama dan Kepercayaan	67
8. Keadaan sosial	68
B. Pelaksanaan Praktik Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) Tanpa Ketentuan Pada Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus	72

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) Tanpa Ketentuan pada Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus	77
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) Tanpa Ketentuan pada Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Rekomendasi	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Populasi Penduduk Menurut Kelompok Umur	67
3.2 Jumlah Penduduk Desa Wayjelai Berdasarkan Agama	67
3.3 Mata Pencaharian Desa Wayjelai	69
3.4 Tingkat Pendidikan Desa Wayjelai	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan agar tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi. Disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Skripsi ini berjudul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) Tanpa Ketentuan (Studi pada Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus)”**. Untuk itu perlu diuraikan dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Hukum ekonomi Syariah dalam konsep yang sempit yaitu hukum bisnis Syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis, seperti jual beli, perdagangan dan perniagaan yang didasarkan pada hukum islam dan konsep yang lebih luas yaitu hukum ekonomi Syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum islam.²

¹ Hamid, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Pustaka dua, 1999), h. 430

² Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 7

3. Upah adalah penukaran, atau pemilikan manfaat atau menjual tenaga dengan imbalan mendapat penggantinya.³
4. Anak buah kapal (ABK) yaitu semua orang yang bekerja dikapal, yang bertugas mengoprasikan dan memelihara serta menjaga kapal dan muatannya.⁴

Berdasarkan urian diatas, maka maksud judul skripsi ini adalah mengkaji praktik pembayaran upah dari sudut pandang hukum ekonomi Syariah, tentang praktik pengupahan ABK tanpa ketentuan pada Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam hidup setiap manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap orang. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah hukum agar tidak terjadi bentrokan antar kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum muamalah. Obyek muamalah sendiri dalam islam mempunyai bidang yang amat luas sehingga Al-Qur'an dan As-Sunnah mayoritas banyak membicarakan tentang muamalah termasuk salah satunya dalam hal pengupahan.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, manusia tidak akan lepas dari hubungan terhadap sesama manusia. Tanpa adanya hubungan dengan orang lain, tidak mungkin berbagai kehidupan manusia dapat terpenuhi. Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk

³ Hendi Suhendi, Fiqh Mu'amalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.115

⁴Yaharmas, "ABK-Anak Buah Kapal" Japra Group, 2017, <https://japragroup.wordpress.com/2017/09/11/apa-itu-abk-anak-buah-kapal/>.

mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan, untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani salah satunya dalam perbuatan muamalah adalah system kerjasama pengupahan.⁵

Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerjasama antara dua pihak, dimana satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja, dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut majikan untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh atau pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama ini dalam literature fiqh disebut dengan akad *ijarah al-a'mal*, yaitu sewa-menyewa jasa manusia.⁶

Pada hakikatnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan rugi. Sehingga terciptalah keadilan diantara mereka. Dalam QS. Al-jathiyah [45] ayat 22, Allah berfirman :

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٢)
”Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan rugikan”. (QS. Al-jathiyah [45] ayat 22).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan semua manusia dengan haq dan Allah pun menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang haq, yakni penuh hikmah dan aturan, supaya bukti-bukti mengenai ketuhanan dan mahakuasa Allah menjadi tampak jelas, selain itu

⁵ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Edisi pertama, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2012), h. 2.

⁶ Rahmat Syafe’I, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 215.

juga diberi balasan yang adil bagi tiap-tiap jiwa, yakni manusia sesuai dengan kebaikan dan kejahatan yang dia kerjakan dan mereka dalam menerima balasan itu sedikitpun tidak akan dirugikan bahkan yang berbuat baik akan diuntungkan.⁷

Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikan dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya), karena setiap hak dibarengi kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi.⁸

Rasuluallah mendorong para majikan untuk membayarkan upah para pekerja ketika mereka telah usai menunaikan tugasnya. Rasuluallah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ. قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجة)

Dari Abduallah Bin Umar, ia berkata: telah bersabda Rasuluallah SAW: “Berikan upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (H.R Ibn Majah).

Ketentuan ini menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka tidak akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, demikian umat

⁷ M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.361.

⁸ Yusuf Qordawi, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, (Jakarta: Rabbani Perss, 2001), h. 405.

islam diberi kebebasan untuk untuk menentukan waktu pembayaran upah yang sesuai dengan kondisi.⁹

Berkaitan dengan hal ini di Desa Wayjelai kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus merupakan desa yang mayoritasnya bekerja dilaut sebagai nelayan atau sebagai anak buah kapal (ABK). Namun dalam hal ini kapal tersebut disewakan untuk carteran pemancingan dan pengisian air kapal tengker dengan menggunakan jasa anak buah kapal. Tarif yang diberikan kepada penyewa menyesuaikan jarak pemancingan, hal ini tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Kerjasama yang dilakukan antara pemilik dengan anak buah kapal menggunakan praktik pengupahan.

Selama ini pengupahan yang dilakukan pemilik dengan anak buah kapal atas dasar kepercayaan tanpa ada ketentuan nominal yang jelas. Pembayaran upah yang diberikan oleh pemilik kapal tanpa sepengetahuan anak buah kapal besaran nominalnya, sehingga tidak adanya kejelasan antara pemilik dengan anak buah kapal. Praktik pembayaran upah dilakukan setelah penyewaan kapal selesai, artinya upah akan diberikan ketika penyewa telah melakukan pembayaran kepada pemilik kapal. Namun terkadang upah yang diberikan mengalami penundaan atau digabung dengan pekerjaan berikutnya. Upah yang diterima oleh anak buah kapal tidak menentu jumlah nominalnya.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti apakah pelaksanaan praktik pengupahan ABK pada Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, telah sesuai dengan dengan hukum islam.

⁹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.113.

Karena praktik pengupahan tersebut tanpa adanya ketentuan yang jelas dan terdapat penggabungan pembayaran serta tidak ada transparansi antara pemilik dengan anak buah kapal.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis bermaksud untuk meneliti hal tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengupahan ABK Tanpa Ketentuan (Studi pada Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus)”.

C. Fokus dan Sub -Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian atau *research* yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada suatu objek yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian¹⁰. Fokus penelitiannya yaitu antara pemilik dengan anak buah kapal (ABK).

Adapun sub-fokus penelitian dalam skripsi ini adalah terletak pada praktik pengupahan antara pemilik kapal dengan ABK, dan akan ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Adapun alamat atau tempat penelitian yaitu beralamatkan di Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

¹⁰Susiadi, Pedoman Penulisan Skripsi, (Bandar Lampung: pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 95.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pengupahan ABK tanpa ketentuan pada Dermaga II Desa Wayjelai kecamatan Kotaagung kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik pengupahan ABK tanpa ketentuan pada Dermaga II Desa Wayjelai kecamatan Kotaagung kabupaten Tanggamus ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik pengupahan ABK tanpa ketentuan pada Dermaga II Desa Wayjelai kecamatan Kotaagung kabupaten Tanggamus
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik pengupahan ABK tanpa ketentuan pada Dermaga II Desa Wayjelai kecamatan Kotaagung kabupaten Tanggamus

F. Manfaat Penelitian

Hal terpenting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah diketahui hasil penelitian. Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat muslim serta para sarjana hukum islam khususnya tentang bermuamalah.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan ilmu Syariah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan Pustaka ialah suatu bagian dari skripsi yang bersifat penting, kemudian dari segi uraiannya tinjauan Pustaka merupakan bagian dari skripsi yang paling Panjang. Artinya melalui suatu tinjauan Pustaka tersebut, seseorang dapat mengetahui secara jelas, tentang penelitian yang akan dilaksanakan baik menyangkut masalah penelitian serta cara penelitian yang akan dilaksanakan.¹¹

Sejauh pengetahuan penulis, pada saat ini terdapat beberapa karya ilmiah seperti jurnal, artikel, ataupun karya ilmiah lainnya yang membahas tentang praktik praktik pengupahan maupun masalah yang berkaitan lainnya yang terjadi dimasyarakat. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi penulis, melakukan tinjauan Pustaka dengan tujuan untuk menambah literatur sebagai

¹¹ Kaelan, Metode penelitian kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 236.

bukti bahwa penulis telah memahami literatur ataupun masalah yang sedang atau akan diteliti.

Adapun yang menjadi literatur dalam tinjauan Pustaka adalah skripsi Ria Astuti, tahun 2018, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul Tinjauan Hukum Islam tentang upah minimum regional (UMR) bagi pegawai PT. Budi Lampung Sejahtera (BLS). Fokus penelitian yang dilakukan oleh saudara Ria Astuti adalah pada praktik upah minimum regional (UMR) yang dilakukan oleh PT. Budi Lampung Sejahtera (BLS) terhadap pegawainya di Way Hanakau, Kecamatan Pakuan Ratu.¹²

Dalam skripsinya, Ria Astuti melakukan kajian teori dengan menggunakan teori pengupahan dalam islam, hak dan kewajiban pekerja, perjanjian kerja dan praktik pengupahan yang didasarkan pada undang-undang ketenagakerjaan, tingkatan pemberian upah, ijarah, dan hikmah dari akad ijarah. Sedangkan untuk metode penelitian yang digunakan oleh saudara Ria Astuti adalah menggunakan metode *field Research* yang pada hakikatnya merupakan sebuah metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa saja yang terjadi dilapangan dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif normative. Yaitu, dengan cara mengolah data yang diperoleh kemudian di Analisa secara bertahap dan berlapis dengan menggunakan Analisa kualitatif.¹³

¹² Ria Astuti, "Tinjauan Hukum Islam Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS)". (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018). h. 10.

¹³ *Ibid.*, h. 11.

Berdasarkan hasil penelitian dan Analisa data yang dilakukan oleh saudari Ria Astuti diketahui bahwa praktik atau praktik pembayaran yang dilakukan oleh PT. Budi Lampung Sejahtera adalah menggunakan praktik perindividu, yang mana upah yang diberikan tidak sesuai dengan standar upah minimum regional (UMR) setempat. Oleh karena itu, menurut para pegawai PT. Budi Lampung Sejahtera mengenai praktik pengupahan yang diberlakukan oleh PT. Budi Lampung Sejahtera dirasa kurang baik, karena dapat mengakibatkan timbulnya rasa kecurigaan antar sesama pekerja atau pegawai dengan diberlakukannya praktik potongan upah yang tidak seragam dan tidak jelas (*gharar*). Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan konsep pengupahan dalam hukum islam yang menekankan pada nilai-nilai keadilan dan kelayakan.¹⁴

Selain itu, penulis melakukan tinjauan Pustaka berdasarkan kajian terdahulu yaitu pada skripsi saudari Umi Kholifatul Mahmuda pada tahun 2018, fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah dengan Praktik *Piyak* (di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora). Fokus penelitian yang dilakukan oleh saudari Umi Kholifatul Mahmuda adalah pada pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan praktik *piyak*.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, h. 123.

¹⁵ Umi Kholifatul Mahmuda, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), h. 6.

Dalam skripsinya, Umi Kholifatul melakukan kajian teori dengan menggunakan teori pengupahan dalam islam, macam-macam upah mengupah, sifat akad *ijarah*, pembayaran upah serta batal dan berakhirnya akad *ijarah*. Sedangkan untuk metode penelitian yang digunakan oleh saudari Umi Kholifatul Mahmuda adalah dengan menggunakan metode *field research* yang pada hakikatnya merupakan sebuah metode untuk mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan upah, dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Yaitu sebuah metode analisis yang mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu factual secara praktikatis dan akurat dengan menggunakan Analisa kualitatif.¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian dan Analisa data yang dilakukan oleh saudari Umi Kholifatul Mahmuda diketahui bahwa praktik pengupahan dengan praktik *piyak* di Desa Pilang Kecamatan Radublatung Kabupaten Blora telah berjalan sesuai dengan perjanjian. Pembayaran dengan praktik *piyak*/bagian berupa gabah/pada telah berlangsung sejak lama dengan kebiasaan masyarakat. Kehadiran jasa pengairan sawah di Desa Pilang memberikan sebuah kemanfaatan dipihak petani, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dalam hal pengairan yang dapat membantu petani dalam proses bercocok tanam. Manfaat yang telah diberikan jasa pengairan sawah ini dibayar dengan upah gabah/padi *se-piyak* (satu bagian) dari 4 sehingga 5 *piyak-an*. Pembayaran upah juga disesuaikan dengan kualitas daru hasil panen yang didapatkan. Apabila hasil banyak dan memiliki kualitas pada

¹⁶ *Ibid*, h. 15

yang bagus maka besar pula upah yang akan diterima jasa pengairan sawah dan sebaliknya. Namun, meskipun tidak diketahui secara pasti ukuran upah yang akan diterima dalam satu piyak, kedua belah pihak telah bersepakat dan saling merelakan atas hasil yang didapatkan.

Pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan praktik *piyak* sudah sejalan dengan akad *ijarah*. Jika dilihat dari segi rukun, praktik pengupahan ini telah memenuhi rukun dalam akad *ijarah*. Namun ada beberapa hal yang tidak terpenuhi terkait dengan syarat *ijarah*, yaitu upah (*ujrah*) yang dibayarkan belum diketahui ukurannya secara pasti. Meskipun demikian, pelaksanaan upah lebih banyak mengandung kemaslahatan dari pada kemudharatan. Sehingga pelaksanaan akad *ijarah* dalam praktik pengupahan dengan praktik *piyak* telah sah dan diperbolehkan menurut hukum islam. Adapun permasalahan terkait pembayaran upah yang tidak diketahui secara jelas, tidak menjadikan alasan pelarangan praktik *piyak* ini. Perolehan upah yang tidak pasti dikarenakan adanya penyesuaian dengan perolehan hasil panen. Namun hal ini tidak mengurangi rasa keadilan dan kebersamaan yang menjadi prinsip dasar dari praktik *piyak* ini, masing-masing telah rela dengan upah yang diterima. Sehingga pelaksanaan praktik *piyak* diperbolehkan oleh hukum islam.¹⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan saudari Septiana Tri Lestari, tahun 2020, fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul

¹⁷ *Ibid.*, h. 92

Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan upah dalam pembayaran listrik. Fokus penelitian yang dilakukan saudari Septiana adalah pada upah tambahan yang diminta oleh petugas penagih listrik kepada masyarakat desa gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

Dalam penelitiannya, Septiana melakukan kajian teori dengan menggunakan teori pengupahan dalam islam, pengertian *ujrah*, dasar hukum *ujrah*, rukun dan syarat *ujrah*, macam-macam *ijarah*, prinsip-prinsip *ijarah*, berakhirnya akad *ijarah*. Sedangkan untuk metode penelitian yang digunakan saudari Septiana adalah menggunakan metode *field Research*, dan menggunakan Analisa *kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian dan Analisa data yang dilakukan oleh saudari Septiana diketahui bahwa praktiknya ada petugas yang ditunjuk oleh kelurahan sebagai penagih listrik di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran dengan gaji sebesar Rp 700.000, namun petugas tersebut meminta upah lebih kepada masyarakat dengan cara membulatkan uang tagihan listrik. Jika tagihan listrik satu rumah sebesar Rp 36.000, maka petugas meminta upah kepada masyarakat sebesar 4.000, maka dibulatkan menjadi 40.000, setiap rumah jumlah upahnya berbeda beda tergantung jumlah tagihannya. Maka penetapan upah yang dilakukan petugas menggunakan praktik pembulatan maka adanya ketidakadilan bagi masyarakat tersebut. Praktik pengupahan tersebut belum sesuai dengan hukum islam sebab adanya penetapan biaya upah dengan cara membulatkan

biaya listrik yang hanya dilakukan sepihak tanpa persetujuan dari masyarakat.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada praktik pengupahannya, yang dimana pada praktik pengupahan ini dilakukan antara pemilik kapal dengan ABK. Namun sejak menjalin hubungan kerja, tidak ada ketentuan nominal upah, lamanya waktu bekerja serta hak dan kewajiban pekerja.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasannya, karena metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah datanya. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan langkah yang praktis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang pengumpulan datanya diambil dari lokasi atau lapangan.¹⁹ Penulis nantinya akan melakukan penelitian secara langsung ke lokasi atau objek penelitian, yaitu pada praktik pengupahan ABK tanpa ketentuan pada Dermaga II Desa Wayjelai, Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Hal tersebut dilakukan

¹⁸Septiana Tri Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik (Studi di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 6.

¹⁹ Kartini kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: mandar maju, 1996), h. 81.

sebagai pemenuhan data primer dalam pembuatan skripsi. Sedangkan untuk data sekunder, penulis mencarinya dari buku-buku fikih muamalah dan buku-buku lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif normatif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu permasalahan atau hasil penelitian secara objektif, tepat dan peka terhadap gejala yang terjadi pada individu atau kelompok tertentu.²⁰

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu suatu data yang diperoleh atau bersumber langsung dari objek penelitian atau informan.²¹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pelaku pengupahan yaitu pemilik dengan ABK. Hasil wawancara atau observasi, dan dokumentasi pada Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah data yang diperoleh melalui pihak lain, berupa data yang diperoleh dari beberapa buku dan wawancara dengan masyarakat.²² Adapun data sekunder dalam penelitian ini

²⁰ Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Jakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h. 142.

²¹ Muhamad Tika Pambundu, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 4.

²² Susiadi, *Metodologi Penelitian*, h. 96

adalah masyarakat Desa Wayjelai yang saling berhubungan dengan permasalahan yang akan atau sedang diteliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian mungkin manusia, gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.²³ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik kapal dan 6 ABK pada Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

b. Sampel

Sampel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti.²⁴ Seperti yang dikemukakan Dr.Suharsimi Arikunto apabila subjek <100 orang, lebih baik diambil semua sehingga penelitian ini adalah populasi. Selanjutnya jika jumlahnya subjeknya besar, dapat diambil 10-15% atau 20 sampai 50 lebih.²⁵ Karena penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan objek penelitian. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pemilik kapal dan 6 ABK di Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodelogi*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), h. 27.

²⁴ Sutrisno, *Metodelogi Research Kualitatif*, (Bandung: R&D, 2009), h. 120.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III Cet. Ke-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 115.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian menggunakan pengamatan dan penginderaan.²⁶ Hal tersebut dilakukan dengan cara memilih, mencatat dan melakukan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, dan sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²⁷ Dalam hal ini penulis memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang langsung ke tempat penelitian dan mewawancarai pihak terkait yaitu pemilik dan anak buah kapal di Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam suatu penelitian yang berlangsung secara lisan, dilakukan oleh dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan, dan atau mencatat secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang ingin didapatkan sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan dalam suatu penelitian.²⁸ Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu pihak yang pembuat perjanjian kerja serta masyarakat Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Hal tersebut dilakukan dengan

²⁶Mudadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Positivik Rasionalistik Fenomenologik dan Realisme Metaphisik dalam Telaah Studi Teks Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 118.

²⁷Susiadi, *Metodologi Penelitian*, h.96.

²⁸Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 96.

tujuan untuk memperoleh informasi yang factual, menarik dan menambah kepribadian individu (kepekaan).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan untuk mencari data mengenai suatu hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar majalah ataupun keadaan Desa Wayjelai. Adapun yang dimaksud dengan data disini adalah data suatu data yang berkaitan dengan data lapangan.²⁹

5. Metode Pengolahan Data

a. *Editing*

Editing yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan atau suatu kegiatan untuk mengadakan pemeriksaan kembali apakah data-data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan relevan dengan data yang diperoleh dari studi *literature* yang berhubungan dengan penelitian maupun data dari lapangan.³⁰

b. *Coding*

Pemberian tanda kata yang diperoleh berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau symbol atau kata tertentu yang menunjukkan kelompok atau golongan tertentu atau klasifikasi berdasarkan jenisnya.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 82

c. Sistematis

Yaitu bertujuan untuk merapihkan dan menempatkan data-data yang telah diperoleh dalam suatu kerangka sistematika penulisan, atau bahasa berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data, yang telah di edit dan kemudian diberi tanda menurut kategori dan urutan masalah.³¹

6. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul melalui *instrument* pengumpulan data, maka selanjutnya data akan dianalisis. Sedangkan metode analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu, tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik pengupahan ABK tanpa ketentuan, adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini yaitu terjadi di Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Kemudian, setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif yang disusun secara bertahap dan berlapis, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, praktikatis dan kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan berfikir deduktif. Yaitu mencari, menjelaskan dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.³²

³¹ *Ibid.*, h. 83

³² Ashofa, Metode Penelitian Hukum, h. 74

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini. Maka penulis membagi sistematika pembahasan dalam skripsi ini, terdiri atas bagian awal yang meliputi cover, abstrak, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi. Dan bagian isi yang meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penegasan judul, untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi. Lalu latar belakang masalah, untuk mendeskripsikan *academic problem* (problem akademik) yang mendorong mengapa penelitian dilakukan. Kemudian dilanjutkan fokus dan sub-fokus penelitian untuk menerangkan hal apa yang menjadi dasar fokus penelitian. Selanjutnya rumusan masalah, rumusan masalah ini sangat penting, karena posisinya secara tidak langsung memandu peneliti dalam mengarahkan fokus penelitian yang dilakukan. Kemudian dipaparkan tujuan dan manfaat, untuk memastikan dapat tidaknya penelitian tersebut menghasilkan temuan, baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis. Sub berikutnya adalah kajian penelitian terdahulu yang relevan untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan sub bab metode penelitian dan praktikatika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori terkait hukum islam tentang *ujrah* yang digunakan sebagai analisis terhadap data yang diperoleh dilapangan yang meliputi : Definisi upah dalam islam, dasar hukum *ujrah*, rukun dan syarat upah, macam-macam akad *ujrah*, prinsip-prinsip *ujrah*, macam-macam *ujrah*, praktik pengupahan, tingkatan dalam pemberian upah, hak dan kewajiban pekerja, batal atau berakhirnya *ujarah*. Kemudian pada sub bab berikutnya terdapat upah dalam ekonomi Syariah, dan pengertian anak buah kapal.

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan gambaran umum dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Dalam bab ini, peneliti juga mendeskripsikan tentang pelaksanaan praktik pengupahan ABK tanpa ketentuan pada dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi praktik pengupahan ABK tanpa ketentuan pada Dermaga II Desa Wayjelai kecamatan Kotaagung kabupaten Tanggamus dan Tinjauan hukum ekonomi Syariah tentang praktik pengupahan ABK tanpa ketentuan pada Dermaga II Desa Wayjelai kecamatan Kotaagung kabupaten Tanggamus.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan rekomendasi, sebagai saran dari hasil penelitian penulis terhadap praktik pengupahan ABK tanpa ketentuan pada Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

Dan bagian akhir yang meliputi daftar Pustaka dan lampiran-lampiran



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam tentang Upah (*Ujrah*)

1. Definisi Upah (*Ujrah*) Dalam Islam

Upah dalam Islam ialah dalam bahasa Arab, upah disebut *ujrah* atau *Ajr*, yang merupakan bentuk masdar dari kata *ya'jir* atau *ajr*, yang berarti memberi hadiah atau upah atas suatu pekerjaan.¹ Dari segi bahasa *al-ajru* berarti *'iwadh* (ganti) kata, *al-ujrah* atau, *al-ajru* yang menurut bahasa berarti ganti, dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Pengertian upah dalam istilah fiqh tidaklah jauh dari maknanya secara bahasa, dalam konteks akad jasa ini, upah dapat didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan.²

Dalam masalah pengupahan, Islam menempatkan suatu pembahasan dalam kitab fiqh yang terdapat dalam bab *Ijarah*, Secara bahasa *ijarah* dan *ujrah* mempunyai makna upah, sewa jasa atau imbalan.³ Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dilihat dari objek nya *ijarah* terbagi menjadi dua yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa, misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan dan lain-lain dan *ijarah* terhadap pekerjaan atau upah mengupah yang

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia, edisi II*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 9.

² Afzalurahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000), h. 395.

³ Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), h. 34

memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan misalnya tukang batu buruh bangunan dan lain-lain⁴.

Pengertian upah adalah hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang semuanya didasarkan atas perjanjian, Kesepakatan atau ruang lingkupnya mencakup pada kesejahteraan keluarganya. Lain halnya dalam peraturan pemerintah yaitu juga mendefinisikan upah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, Dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh termasuk tunjangan baik untuk guru sendiri maupun keluarganya.⁵

Pengertian upah-mengupah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁶

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan atau jasanya sesuai perjanjian.⁷ Dari Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalah), (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 158.

⁵ Radar Jaya Offset, *Peraturan Upah Minimum Di 27 Provinsi Indonesia Edisi 1993*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 296.

⁶ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Surabaya: Gemilang, 2019), h. 137

⁷ Al-Faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989). h. 361.

jasa dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

Upah sendiri mempunyai pengertian yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah, uang dan lain sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁸ Sedangkan dalam Ensiklopedia Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan upah adalah pembayaran yang diterima oleh buruh untuk jasa-jasa yang telah diberikan.⁹

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *ujrah* merupakan bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafaz, *ujrah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu kegiatan.¹⁰

Dalam masalah pengupahan, Islam menempatkan suatu pembahasan dalam kitab fiqh yang terdapat dalam bab *Ijarah*, secara bahasa *ijarah* dan *ujrah* mempunyai Makna upah, sewa jasa atau imbalan.¹¹ Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dilihat dari objek terbagi menjadi dua yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa-

⁸ Pusat Bahasa DepDikNas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1250.

⁹ Hasan Syadily, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1984), h. 3718.

¹⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h. 29.

¹¹ Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 34.

menyewa, misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan dan lain-lain dan ijarah terhadap pekerjaan atau upah mengupah yang mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan misalnya tukang batu, buruh bangunan, dan lain-lain.¹²

Dalam terminologi fiqih muamalah, Kompensasi dalam transaksi antara barang dengan uang disebut *tsaman* atau harga, sedangkan transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut upah/*wages*.¹³ Menurut Hasbi Ash-Ashidique Sebagaimana yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi, Ijarah adalah akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.¹⁴

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga wajar.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu

¹² Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalah), h. 158.

¹³ Hendri Anton, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonomi, 2003), h. 224.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h. 115.

kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian, melalui akad ini bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha yang dapat dijalankan. Seseorang laki-laki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Pernyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan tidak terlepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).¹⁵

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, dan manusia memiliki kebutuhan untuk melakukan suatu kegiatan. Salah satunya adalah dengan melakukan sesuatu untuk mewujudkan sesuatu yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Orang lain dapat melakukan sesuatu dengan melibatkan atau memfungsikan orang

¹⁵ *Ibid.*, h. 114.

lain dengan ketentuan dan kegiatan, dengan konsekuensi harus memberikan imbalan yang akan menimbulkan bentuk kegiatan manusia yaitu adanya transaksi dalam suatu pekerjaan yaitu upah-mengupah atas jerih payah orang lain tersebut jika tidak, berarti termasuk orang-orang yang zalim. Setiap manusia akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan dan berusaha agar dapat memperoleh nafkah atau penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Jum'ah [62] ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S.Al-Jum'ah [62] ayat 10).

Upah adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.¹⁶

2. Dasar Hukum Upah (*Ujrah*)

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. I, (Jakarta: Griya Media Pratama, 2000), h. 229

Hampir semua ulama Fiqih sepakat bahwa hijrah disyariatkan dalam Islam. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Jumhur ulama berpendapat bahwa ujarah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma'.

a. Al-Qur'an Surat Al-Qashsa [28] ayat 26-27 disebutkan:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَّخِذَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَاجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya Bapak ku ambil lah ya Sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. berkatalah dia (Syu'aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun dan jika kamu cukupkan 10 tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”(Q.S. Al-Qashsa [28] ayat 26-27).

Ayat tersebut menerangkan bahwa ijarah telah disyariatkan oleh ulama Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seseorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh Ayat tersebut.

b. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] ayat 233 disebutkan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۚ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ

مِنْهُمَا وَتَشَاوِرْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِيْعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagaimana apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat Apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 233).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akad nya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dengan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.¹⁷

c. Al-Qur'an Surat An-Nahl [16] ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)

”Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”(Q.S. An-Nahl [16] ayat 97).

¹⁷ Ahmad Musthofa Al-Margahi, *Tafsir Al-Maragih*, (Semarang: CV Toha Putra, Cet. Pertama, 1984), h. 350.

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja di suatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal saleh dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, Maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.

d. As-Sunnah

Berdasarkan ayat Al-Quran, Ada beberapa hadis yang menegaskan tentang upah, Hadis Rasulullah SAW menegaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)¹⁸

“Dari Ibnu Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW,” berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering. (H.R Ibnu Majah)”.

Selain itu, sebaiknya upah dalam transaksi ujah disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besaran atau kecilnya upah pekerja. Hadist riwayat Abu Said Al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَخَذَ رِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ جَرَّاجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)

¹⁸ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram* (Ibnu Haja Al-Asqalani), Jakarta: Pustaka Amani, Cet.I, 1995), h. 361

“Dari Abu Sa’id Al Khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, Barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya (H.R Abdurrazaq)”.

Sabda Rasulullah:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحُجَّامِ فَقَالَ : اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، (رواه البخاري)¹⁹

“Dari Annas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari pekerjaan membekam, dia mengatakan:” Rasulullah SAW . Di bekam oleh Abu thaibah, dan beliau memberinya imbalan sebanyak dua sha makanan”.

Allah memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti dalam hadis yang diriwayatkan muslim, sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ أَقِيَامَةِ رَجُلٍ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرُوا رَجُلًا بَاعَ حُرًّا، قَالَ كُلُّ ثَمَنُهُ، وَرُلُ اسْتَأْجَرَ²⁰ فَا سَتَوُ فَمِنْهُ وَمَنْ يُعْطِهِ أَجْرُهُ. (رواه مسلم)

“Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW. Bersabda, Tiga golongan yang aku musuhi kelak di Hari Kiamat ialah: seseorang yang memberi perjanjian dengan Nama-Ku, kemudian ia khianati, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan kuli, lalu pekerjaan itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi upahnya. (H.R Muslim).”

e. Landasan Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa ijarah

¹⁹ Achmad Sunarto dkk, *Terjemahan Shahih Bukhari*, Jilid 7, (Semarang: CV. As-Syifah, 1993), h. 483.

²⁰ Imam Taqiyuddin, *Khifayatul Akhyar (Kalangan Orang Saleh)*, Cet. Pertama, (Surabaya: Bima Imam, 1994), h. 695.

dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama bersepakat dengan ijma' ini. Karena Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²¹ Ibnu Rusyd dalam kitab bidayah Al-Mujtahid, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa-menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”.²²

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil-dalil syara' sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa atau upah mengupah, dengan kata lain sewa-menyewa atau upah mengupah diperbolehkan dalam hukum Islam apabila bernilai secara syar'i dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.

3. Rukun dan Syarat Upah (Ujrah)

a. Rukun Upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, Tiang, lantai dinding atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 22

²² Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Juz 2*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, tt), h. 165

sesuatu itu disebut rukun.²³

Ahli ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah Ijab dan qobul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan: Adapun sewa-menyewa ialah Ijab dan qobul, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksudkan dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa-menyewa adalah sifat yang dengannya tergantung kebenarannya (sahnya) sewa-menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa-menyewa.

Jadi menurut ulama hanafiyah rukun sewa menyewa ada dua yaitu Ijab dan qobul. Hal ini disebabkan para ulama hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa-menyewa itu sendiri. Adapun menurut jumhur ulama, hukum ujah ada 4 yaitu:

1) *A'qid* (orang yang berakad)

Aqid yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan

²³ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 117.

disebut *Mu'ajjir* Dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *Musta'jir*.²⁴ Karena Begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, Maka golongan Syafi'iyah dan Hanafiyah Menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.²⁵ Agar suatu perikatan yang dijalankan oleh subjek perikatan terpenuhi, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

2) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul-'aqqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*.²⁶ Dalam Hukum Perjanjian Islam Ijab dan qabul dapat terjadi melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, dan 5) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan Ijab dan Qabul pada jual beli, hanya saja Ijab dan Qabul dalam *ujrah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.²⁷

3) Upah (*Ujrah*)

Ujrah disyaratkan diketahui jumlah oleh kedua belah pihak, baik itu dalam hal sewa-menyewa ataupun dalam hal upah mengupah.

²⁴ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 117

²⁵ Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, h. 95

²⁶ *Ibid.*, h. 118

²⁷ *Ibid.*, h. 95

4) Barang yang disewakan

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan Beberapa syarat:²⁸

- a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya
- b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa)
- c) Manfaat dari benda yang di Sewa adalah perkata yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d) Benda yang disewakan ke kalau 'ain (zat)-Nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

5) Manfaat

Untuk mengontrol seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk, kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaan yang harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak).²⁹

b. Syarat Upah

Dalam hukum Islam diatur sejumlah persyaratan yang berkaitan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, h.232

dengan unsur atau upah, yaitu:³⁰

- 1) Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad, pemberian upah harus dilakukan dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan bukan karena keterpaksaan
- 2) besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad. Upah harus dilakukan dengan musyawarah dan konsultasi yang terbuka, sehingga dapat terwujudnya di dalam diri para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang ada padanya.
- 3) Tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah dibawah standar .
- 4) Upah harus dari suatu perbuatan yang jelas batas waktu pekerjaannya, misalnya pekerjaan mencuci, memasak dan sebagainya. Artinya dalam masalah upah mengupah, Diperlukan adanya uraian pekerjaan dan tidak dibenarkan mengubah seseorang dalam ketidakjelasan periode waktu atau jenis pekerjaannya. Upah harus berupa mal mutaqawwim (harta yang bernilai) dan dinyatakan secara jelas (baik dari segi jenis upahnya, besaran upah dan sebagainya). Kejelasan dilakukan

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), h. 308

secara konkrit atau dengan menyebutkan kriteria.³¹

a) Penjelasan tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya dan dapat diketahui .

b) Penjelasan waktu

Ulama hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, Sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi.

c) penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan .

d) penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

e) Pembayaran (uang) sewa harus bernilai dan jelas

Jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.

Syarat-syarat pokok dalam Al-Quran maupun As-sunnah mengenai

³¹ Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.

hal pengupahan adalah para musta'jir harus memberi upah kepada Mu'ajjir sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan Mu'ajjir harus melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral dari pihak mustazhir maupun Muhajir dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

4. Macam-macam Upah (*Ujrah*)

Dalam Fiqih mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua:

- a. Upah yang telah disebut (*ajrun musamma*) Adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad
- b. Upah yang sepadan (*Ajrun mitsli*) Adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (Profesi kerja) Jika akad ijarah telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Berdasarkan objek nya, akad ijarah dibagi menjadi dua:

- a. *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), Misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini mu'ajjir mempunyai benda-benda tertentu dan musta'jir butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana Mu'ajjir mendapatkan imbalan tertentu dari musta'jir, dan musta'jir mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan syara untuk dipergunakan, maka para ulama Fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa .
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah ala al-a'mal*) ialah Dengan

cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Sejarah seperti ini menurut ulama Fiqih, hukumnya boleh Apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buru tani. Mu'ajir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu'ajir mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk musta'jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu'ajir.³²

Adapun pada awalnya jenis upah terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang mu'amalah pada saat ini, maka jenis pun sangat beragam, diantaranya:

1) Upah mengajarkan al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari mengajar al-qur'an dan ilmu-ilmu Syariah lainnya, karena para guru membutuhkan menunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Waktu mereka juga tercipta untuk kepentingan pengajaran Alquran dan ilmu-ilmu Syariah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pelajaran ini.³³

2) Upah sewa menyewa tanah

Bolehnya menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewakan, jenis apa yang ditanami di

³² Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 231

³³ Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, h. 22

tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dinyatakan fasid (tidak sah).³⁴

3) Upah sewa menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, Dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya. Selain itu, kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.

4) Upah sewa menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, Atau penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

5) Upah menyusui anak

Ukuran sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusui anak, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al Baqarah [2] ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى

³⁴ Ibid, h.30

الْمَوْلُودَ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
 عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

“Dan jika kamu ingin Anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat Apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. Al Baqarah [2] ayat 233)

6) Perburuhan

Selain sewa menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebutkan perburuhan. Guru adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikerjakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.³⁵

5. Prinsip-prinsip Upah (*Ujrah*)

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan pada prinsip pengupahan, agama Islam mengenal beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan upah. Adapun prinsip-prinsip pengupahan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Keadilan

Sudah Selayaknya seorang pengusaha untuk memberikan upah yang adil. Oleh karena itu, seorang buruh berhak menuntut

³⁵ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 133

upah kerja yang seimbang dan tanpa harus mengintimidasi atau merugikan pihak lain.³⁶

Dalam pengupahan terdapat ada dua prinsip keadilan yang harus ada dalam setiap pengupahan, yaitu prinsip keadilan distributif, dan prinsip keadilan harga kerja. Prinsip keadilan distributif adalah suatu prinsip pengupahan yang menuntut seseorang guru untuk melakukan suatu pekerjaan yang sama dengan kemampuan kadar kerja yang berdekatan. Sedangkan prinsip keadilan harga kerja adalah sebuah prinsip pengupahan pengusaha untuk memberikan upah yang seimbang dengan tenaga yang diberikan tanpa dipengaruhi oleh hukum penawaran, maupun hukum permintaan.³⁷ Prinsip keadilan adalah pengupahan telah disyariatkan dalam Al-Qur'an surat al-maidah [5] ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu . (yang demikian itu) Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S.Al-maidah [5] ayat 1).

Dalil tersebut menjelaskan bahwa Prinsip utama dalam pengubahan adalah prinsip keadilan yang dimana terletak pada

³⁶ Abdul Khakim, *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006), h. 221.

³⁷ Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Mgistra Insania Press, 2003), h. 40.

kejelasan akad. Sehingga pada saat melakukan suatu perjanjian kerja, selayaknya seorang mu'jir ataupun musta'jir harus mengetahui besaran upah dan tata cara pembayaran upahnya.³⁸

Sehingga dapat dipahami bahwa dalam Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai atau prinsip keadilan dalam segala bentuk kegiatan muamalah, seperti menghindari segala bentuk praktik yang mengandung unsur gharar atau riba. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah [2] ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah [2] ayat 188).

b. Prinsip Kelayakan

Sudah seharusnya upah kerja diberikan secara layak, yaitu memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak. Oleh karena itu, penting menerapkan prinsip kelayakan dalam pengupahan. Adapun kata layak di sini bermakna sebagai berikut:

- 1) bermakna mampu mencukupi kebutuhan sedang, pangan, dan papan. Konsep ini merupakan sebuah konsep yang sudah ada sejak 14 abad yang lalu, dimana para pengusaha Arab sering kali memperhatikan kehidupan karyawan mereka di luar

³⁸ Ibid., h. 42

lingkungan kerjanya.

- 2) bermakna sesuai dengan pasaran, yaitu seorang pengusaha maupun buruh dilarang untuk merugikan orang lain, yaitu dengan cara mengurangi hak orang lain. Contohnya memberi upah jauh di bawah yang biasanya diberikan.³⁹

c. Prinsip Kebijakan

Dalam sebuah perjanjian, kedua belah pihak harus bersikap jujur dan adil dalam semua urusan (bijak). Hal tersebut merupakan sebuah bentuk upaya untuk menjauhkan dari perbuatan aniaya dan merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk mempertahankan suatu upah pada standar minimum Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (akad). Kata bebas di sini adalah baik pengusaha maupun buruh bebas untuk mencari penghidupan di mana saja dengan tidak memaksa buruh untuk bekerja pada suatu perusahaan tertentu saja, melainkan bebas jika sewaktu-waktu ingin mencari pekerjaan rumahnya lebih tinggi.⁴⁰

6. Macam-Macam Upah

Dalam ilmu ekonomi ataupun fiqih muamalah, dikenal beberapa jenis pengupahan. Adapun macam-macam pengubahan adalah sebagai berikut :

³⁹ Efendi, *Produksi Dalam Islam*, h. 41

⁴⁰ Afsur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 368

a. Upah borongan

Upah borongan merupakan jenis pengupahan yang didasarkan pada banyaknya hasil dari sebuah pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan. Upah borongan juga tidak tergantung pada waktu atau berapa lama seseorang menyelesaikan pekerjaan tersebut . Dalam fiqih muamalah biasanya dikenal dengan akad ijarah atau jua'lah yang diambil dari kata ja'la-yaj'alu-ja'alah yang bermakna mengadakan atau menjadikan. Sedangkan secara istilah, menurut 4 Imam mazhab yang dimaksud dengan ju'alah adalah sebuah imbalan atau upah terhadap suatu manfaat yang diberikan kepada seseorang berdasarkan hasil. Contohnya Ketika seseorang bekerja yang membuat sumur, maka upah akan diberikan setelah ditemukannya sumber mata air dalam pembuatan sumur tersebut.⁴¹ Adapun sumber hukum atau dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut, Q.S Yusuf [12] ayat 72:

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)

“Penyeru penyeru itu berkata : “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan(seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya“.
(Q.S Yusuf [12] ayat 72).

Berdasarkan Surat Yusuf ayat 72 jelas terlihat bahwa pekerjaan dinilai dari hasil kerja yang dilakukan, yaitu mengembalikan piala raja yang hilang. Sehingga dengan demikian, Berarti pengubahan atau upah dimulai dari hasil pekerjaan, Sebab apabila dia telah bekerja memperoleh ialah Raja Tetapi dia tidak

⁴¹ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Depok: raja grafindo persada, 2017), h. 149.

dapat menemukannya, maka ia tidak akan mendapat upah sama sekali.⁴²

Selain itu, para ulama telah bersepakat tentang kebolehan akad ju'alah karena diperlukan untuk mengatur suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dan tidak ada orang yang mau atau bisa membantu secara sukarela. Dan pekerjaan itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya menggunakan akad ijarah karena tidak jelas batas pekerjaan karena di dalam kerja borongan tidak adanya batas waktu dan sebagainya. Oleh karena itu, yang boleh dilakukan adalah menggunakan akad jua'lah.⁴³

b. Upah Harian

Upah harian adalah upah yang diberikan berdasarkan waktu, yang mana biasanya mereka bekerja dari pagi sampai sore. Upah harian lebih banyak digunakan pada bidang pertanian yaitu Buruh Tani.⁴⁴

c. Upah Bulanan

Upah bulanan merupakan suatu imbalan atau kompensasi yang diberikan kepada seseorang karena telah bekerja yang diberikan di setiap bulannya.⁴⁵

7. Sistem Pengupahan

⁴² Rohman Abdur, Multi Level Marketing: Analisis Penerapan Akad *Ju'alah* Dalam Multi Level Marketing (MLM), *Al-Adalah*, Vol. 13 No.2, (2016): 182, <http://103.88.229.8/index.php/adalah/article/viewFile/1856/1515>.

⁴³ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 149

⁴⁴ Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet.I, 2000), h. 229

⁴⁵ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2011), h. 111

Sistem penentuan besaran upah atau pengupahan dapat ditetapkan dengan beberapa cara seperti perundingan, bergantung kepada persetujuan kolektif, boleh diberlakukan berdasarkan kebiasaan praktik pada sebuah perusahaan, atau ditetapkan berdasarkan kombinasi dari cara-cara tersebut, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata yang mana apabila kedua belah pihak tidak menemui kata sepakat baik secara lisan maupun tulisan tentunya perjanjian dan pengupahan tersebut tidak sah dan tidak mengikat para pihak.⁴⁶

Sedangkan menurut UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 88 ayat 2 menjelaskan bahwa sistem pengupahan di Indonesia memperhatikan pada beberapa prinsip dalam pengupahan, seperti prinsip kebijaksanaan yang bertujuan untuk melindungi para pekerja atau buruh. Adapun upah yang dimaksud adalah upah minimum upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan atau melakukan kegiatan di luar pekerjaan, upah menjalankan hak waktu istirahat, upah untuk membayar pesangon dan upah perhitungan pajak penghasilan.⁴⁷

Pemerintah telah menetapkan besaran upah minimum dengan merujuk pada undang-undang ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa upah minimum diberikan berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memerintahkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pencapaian kebutuhan hidup yang layak telah diatur dalam

⁴⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2010), h. 315.

⁴⁷ Haryono, *Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, (Jakarta: BP Cipta Jaya, 2003), h. 31

keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi N. Kep-226/Men/2000 Tentang besaran dan atau kelayakan upah minimum yaitu seorang pengusaha dilarang atau tidak diperkenankan untuk membayar karyawan atau buruh dengan gaji atau upah lebih rendah dari upah minimum regional/provinsi.⁴⁸

Menurut UU Ketenagakerjaan Pasal 90 menjelaskan bahwa pengusaha dilarang untuk membayar karyawan dengan gaji lebih rendah dari batas minimum bagi pengusaha tidak mampu membayar upah minimum dapat melakukan penangguhan, dan Adapun tata cara pengupahan yang dimaksud adalah sebagai berikut :⁴⁹

- a. Pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh, yang mana pada saat pemberian atau pembayaran Upah, upah tidak boleh dibayarkan lebih rendah dari batas minimum yang telah diputuskan oleh menteri ataupun undang-undang yang berlaku.
- b. Kesepakatan sebagaimana yang dimaksud diatas dapat batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Tingkatan Dalam Pemberian Upah

Dalam pengambilan keputusan tentang Upah, maka seorang pengusaha atau majikan akan mempertimbangkan besaran upah yang

⁴⁸ Heri Aryanto, "Keputusan Mentri Tenaga Kerja Dan Imigrasi Perubahan Pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20, Dan Pasal 21 Peraturan Mentri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1999 Tentang Upah Minimum", hukum online.com, 2012, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/karyawan-dibawah-10-orang>.

⁴⁹ Haryono, *Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, h. 34.

akan ditetapkan supaya terwujudnya prinsip-prinsip dalam pengupahan. Dalam penentuan besaran upah, mengenal beberapa tingkatan penentuan pembayaran upah terbagi, yaitu:

a. Upah Minimum.

Upah minimum merupakan batas paling rendah yang menjadi patokan dalam penetapan besaran upah, yang mana upah minimum sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok seorang karyawan atau buruh.

b. Upah Maksimum

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk tidak memberikan upah dibawah tingkat minimum, Dan membiarkan kenaikan upah melebihi tingkatan tertentu, yakni melebihi sumbangsih seorang buruh dalam produksinya pada seorang majikan atau perusahaan. Tersebut bertujuan untuk menjaga upah agar tetap berada pada batas-batas kewajaran masyarakat. Dalil tentang batasan upah maksimum adalah sebagai berikut Q.S An-Nahl [16] ayat: 96.

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۚ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٦)

“Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal dan Sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”(Q.S. An-Nahl [16] ayat: 96).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa batasan mengenai upah tertinggi adalah sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Adapun masalah besaran upah Dikembalikan pada seberapa loyal karyawan atau buruh tersebut pada saat produksi atau bekerja. Dalam pemberian upah harus disesuaikan dengan usaha yang diberikan pada saat produksi atau kerja. Hal tersebut sudah menjadi kewajiban seorang majikan untuk menerapkan prinsip-prinsip pengupahan dalam pemberian atau pembayaran upah terhadap karyawan atau buruhnya.⁵⁰

Menurut undang-undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa ada tiga jenis perjanjian kerja dalam akad ijarah yaitu perjanjian untuk melakukan jasa-jasa perjanjian kerja atau perburuhan, dan perjanjian kerja pemborongan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa

Perjanjian untuk melakukan jasa jasa tertentu, salah satu pihak menghendaki agar pihak lain melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya pihak tersebut adalah seorang notaris, dokter, pengacara dan lain-lain.

2) Perjanjian kerja atau perburuhan

Perjanjian kerja atau perburuhan adalah perjanjian kerja atau akad yang diadakan oleh pihak pekerja atau buruh dengan pihak yang lainnya sebagai pemberi

⁵⁰ Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Ekonomi Islam*, h. 409.

pekerjaan (majikan). Lazimnya pekerjaan ini memberi sebuah perintah kepada pekerja untuk mengerjakan suatu perintah tersebut.

3) Perjanjian kerja borongan

Perjanjian kerja borongan adalah suatu perjanjian atau akad yang diadakan oleh pemborong dengan yang memberikan borongan. Yang mana pengubahan didasarkan pada hasil atau sebuah prestasi.⁵¹ Sebelum terjadinya perjanjian pemborongan, biasanya seorang yang akan memberikan pekerjaan golongan akan memperhatikan pada beberapa kriteria penilaian. Penilaian terhadap pemborong sebelum melakukan pekerjaan dimaksudkan untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang maksimal. Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian kerja borongan disebut dengan ju'alah. Dalam kitab-kitab fiqih dijelaskan bahwa mengenai suatu bentuk pemberian upah yang difokuskan pada suatu hasil atau keberhasilan (prestasi) dari suatu pekerjaan, disebut dengan ju'alah.⁵² Hal tersebut sesuai dengan pendapat empat imam mazhab yang mendefinisikan ju'alah sebagai upah terhadap suatu manfaat yang diberikan kepada seseorang berdasarkan hasil. Contohnya Bekerjalah kamu untuk membuat sumur hingga airnya keluar, sehingga

⁵¹ Suwardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), h. 173

⁵² *Ibid.*, h. 173

dengan begitu upah akan diberikan ketika sudah ditemukannya sumber mata air dalam pembuatan sumur tersebut.⁵³

9. Hak dan Kewajiban Pekerja

Dalam Al-quran atau as-sunnah penjelasan mengenai hak para pekerja tidak dijelaskan secara tekstual. Walaupun demikian ketentuan-ketentuan secara umum yang mengisyaratkan kepada pihak Mu'ajir untuk memberikan hak dan kewajiban terhadap karyawan atau buruhnya. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak baik buruh maupun majikan. Adapun hak dan kewajiban pekerja adalah sebagai berikut:

a. Hak Pekerja

- 1) Kerja berhak menerima atau memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan atau skill pekerja.
- 2) Pekerja berhak untuk menerima upah atau pembayaran secara terhormat yaitu sesuai kesepakatan dan batas minimum pembayaran upah, yang mana hak atas upah ditekankan pada kehadiran pekerja untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diperjanjikan sedangkan bagi 'Ajir musyarak atas upah ditekankan pada selesainya pekerjaan.

b. Kewajiban Pekerja

⁵³ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 149

- 1) Melaksanakan pekerjaan secara mandiri atau berkelompok Sesuai dengan kesepakatan yaitu akad atau perjanjian
- 2) Melaksanakan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan.
- 3) Melaksanakan pekerjaan dengan tekun cermat dan teliti.
- 4) Menjaga keselamatan yang dipercayakan terhadap pekerjaan.
- 5) Mengganti kerugian barang terhadap barang yang rusak atau pun hilang sesuai kesepakatan.⁵⁴

10. Berakhirnya Upah (*Ujrah*)

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:⁵⁵

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang di sewa itu adalah jasa seseorang, maka dia bersih menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama Fiqih.⁵⁶
- c. Menurut ulama hanafiyah wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, Menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena wafat, Menurut mereka

⁵⁴ Ria Astuti, "Tinjauan Hukum Islam Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS)". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018). h. 38

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. I, h. 229

⁵⁶ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 58

boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual beli, Itu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

- d. Menurut ulama hanafiyah, Apabila ada udzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan bisa disita negara karena terkait hutang yang banyak, maka akad al-ijarah adalah salah satu pihak jatuh Muflis, dan Berpindah tempatnya penyewa, misalnya seorang seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum semua itu selesai penutup dosa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad al-ijarah itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran atau banjir.

B. Upah Dalam Ekonomi Syariah

Dalam aspek kehidupan bisnis dan transaksi, Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist. Sistem ekonomi Islam saat ini lebih dikenal dengan sistem Syariah.

Dalam upah (*Al-Ijarah*) adalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijarah* merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan. Syarat mempercepat upah dan menanggukkan yang sebagian lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian kerja dalam Syariah Islam digolongkan kepada perjanjian

sewa-menyewa, yaitu *ijarah a'yan*, sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan.⁵⁷ Syarat dan rukun harus ada dalam setiap aktivitas manusia. Ketika suatu aktivitas tidak memenuhi syarat dan rukun, maka aktifitas tersebut berpengaruh kepada sah tidaknya suatu aktivitas, khususnya dalam perkara upah/*ijarah*.

Dalam Islam memiliki beberapa ketentuan dalam pengupahan yaitu dengan memenuhi syarat-syarat:

- a. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad
- b. Manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah dikemudian hari.
- c. Objek akad itu suatu yang halal atau tidak diharamkan.

Diantara hal terpenting yang ditetapkan Islam bagi pekerja adalah mendapatkan upah sebagai imbalannya, dimana Islam sangat besar perhatiannya tentang masalah upah kerja ini. Tidak ada perbedaan di dalam memberikan upah. Adapun sebab terjadinya didalam perbedaan upah menurut Afzullar Rahman :⁵⁸

- a. Tenaga Kerja Kasar

Tenaga kerja kasar disini, para buruh yang tidak mempunyai Pendidikan atau keahlian didalam melakukan pekerjaannya, sehingga didalam melakukan pekerjaannya dengan mengandalkan kekuatan tubuh, bukan dengan pikiran.

⁵⁷ Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 145.

⁵⁸ Afzullarrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, h. 295

b. Tenaga Kerja Terdidik (terampil)

Tenaga kerja disini, para buruh yang mempunyai Pendidikan yang cukup atau keahlian di dalam bekerja, sehingga kesungguhan dan kesempurnaan pekerjaan seseorang dengan tenaga fisik atau pikiran, kebijaksanaan akan di beri ganjaran dalam bentuk peningkatan kemakmuran hidup.

Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.⁵⁹

Konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak ditengah-tengah masyarakat. Adil dapat bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akan (perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinya dari pihak pekerja dan pengusaha. Prinsip keadilan dan pengupahan mencerminkan organisasi yang dipimpin oleh orang-orang bertaqwa,⁶⁰ konsep adil ini merupakan ciri-ciri organisasi yang bertaqwa.

Firman Allah dalam Q.S Al-maidah [5] ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan (kebeneran) karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Veitzhal Riva’I, *Islamic marketing*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.63.

taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. Al-maidah [5] ayat 8).

Sebagian besar pekerja tidak memiliki daya beli yang cukup, maka hal itu memengaruhi seluruh industry yang memasok barang-barang konsumsi bagi para pekerja, lagi pula perlakuan tidak adil kepada pekerja ini akan menyebabkan timbulnya ketidakpuasan. Dan mereka tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus menunjukkan keadilan dalam hubungan mereka, dan harus membayar upah yang layak kepada para pekerjanya serta harus adil.⁶¹

Selain itu adil bermakna proporsional, hal ini sebagaimana tersirat dalam ayat berikut yang menegaskan bahwa pekerja seseorang menurut berat ringan pekerjaannya, Islam sangat menghargai keahlian dan pengalaman. Allah SWT Q.S Al-Ahqaf [46] ayat 9 berfirman sebagai berikut :

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنِ اتَّبَعِ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٩)

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang tiada dirugikan”.(Q.S. Al-Ahqaf [46] ayat 9).

Ayat tersebut menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya, hal ini menjadi prinsip dalam Islam bahwa bayaran yang sama akan diberikan pada pekerjaan yang sama. Upah adalah hak dan bukan pemberian sebagai hadiah. Upah hendaklah proporsional, sesuai dengan kadar kerja atau hasil produksi dan dilarang adanya eksploitasi.

⁶¹ Muhammad Sharif Chaudri, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 192

Seorang majikan memiliki kewajiban untuk membayar upah yang adil kepada para pekerjanya dan membayar rendah kepada mereka karena tuntutan kebutuhan mereka untuk mendapatkan penghasilan. Sama halnya, jika tingkat upah terlalu tinggi, majikan mungkin mendapatkan keuntungan dan tidak dapat menjalankan perusahaannya. Dalam Islam, upah harus direncanakan dengan cara yang adil baik bagi pekerja maupun majikan.⁶²

Islam menawarkan solusi yang sangat tepat, baik mengenai masalah upah maupun masalah perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan pekerja maupun majikan. Para buruh mendapatkan upah yang layak tanpa melanggar hak-hak majikannya yang sah. Majikan tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan bagian hak pekerjanya yang sah, sementara para pekerja itu tidak diberi seluruh dividen nasional sehingga mengurangi hak yang sah dari majikannya. Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak tanpa tekanan yang tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa bersikap dzalim terhadap yang lain.⁶³

Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan manfaat tenaga seseorang. Berbeda dengan pandangan kapitalis dalam menentukan upah kepada seseorang pekerja dengan menyesuaikannya dengan biaya dalam batas minimum. Sebaliknya, mereka akan menguranginya apabila beban hidupnya berkurang. Oleh karena itu, upah seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya, tanpa memperhatikan jasa yang

⁶² Muhammad Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 175.

⁶³ Afzullarrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, h. 298.

diberikan oleh tenaga seseorang dan masyarakat.⁶⁴

Berdasarkan uraian menunjukkan adanya aturan Syariah dalam bekerja dan menentukan upah, dalam hal ini Syariah sangat menganjurkan adanya profesionalisme didalam bekerja. Karena segala sesuatu harus ditempatkan pada porsinya dan berdasarkan pada keseriusan atau kesungguhan.

C. Anak Buah Kapal

Anak buah kapal atau yang sering disebut ABK yaitu semua orang yang bekerja dikapal, yang bertugas mengoprasikan dan memelihara serta menjaga kapal dan muatannya. Anak buah kapal atau awak kapal terdiri dari dari beberapa bagian. Masing-masing bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri dan tanggung jawab utama terletak di tangan kapten kapal selaku pimpinan pelayaran.⁶⁵

ABK atau anak buah kapal adalah buruh yang bekerja pada sector informal yang tidak mendapat perlindungan undang-undang. Anak buah kapal adalah buruh lepas yang bekerja pada juragan (pemilik kapal). Adapun anak buah kapal (ABK), terdiri dari:

1. Nahkoda

Nahkoda kapal ialah seseorang yang sudah menanda tangani perjanjian kerja laut (PKL) dengan pengusaha kapal dimana dinyatakan sebagai nahkoda, serta memenuhi syarat sebagai nahkoda dalam arti untuk memimpin kapal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku “Pasal 342 KUHD” secara eksplisit menyatakan bahwa tanggung jawab

⁶⁴ Eggi Sudjana, *Islam Fungsional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 332.

⁶⁵ Yaharmas, “ABK-Anak Buah Kapal” Japra Group, 2017, <https://japragroup.wordpress.com/2017/09/11/apa-itu-abk-anak-buah-kapal/>.

atas kapal hanya berada pada tangan nahkoda, tidak ada yang lain. Jadi apapun yang terjadi di atas kapal menjadi tanggung jawab nahkoda, kecuali perbuatan kriminal.⁶⁶

Nahkoda adalah pimpinan dan seorang dari awak kapal bisa disebut juga dengan istilah kapten, yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada di kapal itu. Adapun tanggung jawab lainnya dari nahkoda kapal adalah sebagai berikut:

- a. Memperlengkapi kapal dengan sempurna.
- b. Mengawaki kapal secara layak sesuai prosedur/aturan.
- c. Membuat kapal yang layak laut.
- d. Bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran.
- e. Bertanggung jawab atas keselamatan para pelayar yang ada diatas kapal
- f. Mematuhi perintah juragan (pemilik kapal).

2. Wakil Nahkoda

Wakil nahkoda atau juri mudi adalah bawahan nahkoda yang tugasnya mengemudikan kapal saat berlayar.

3. Motoris

Motoris adalah orang yang bertanggung jawab atas kerusakan kapal salah satunya seperti kerusakan mesin.

4. Tukang Belanja

⁶⁶ Daulay, "Tugas dan Tanggung Jawab Awak Kapal" Wordpress.com, 2012, <https://bukudauly.wordpress.com/>.

Tukang belanja adalah orang yang bertugas membeli segala kebutuhan pokok yang akan dibawa oleh ABK (anak buah kapal) sebagai bekal selama berlayar (melaut).

5. Bandega

Yaitu orang yang bertugas menangkap ikan ketika kapal sedang berlayar. Bandega ini, merupakan bagian paling akhir dari semua anak buah kapal.

67



⁶⁷ Yatna, ABK Desa Wayjelai, Wawancara, tanggal 15 Januari 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2010.
- Afzalurahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000.
- Al-Margahi Ahmad Musthofa, *Tafsir Al-Maragih*, Cet. Pertama, Semarang: CV Toha Putra, 1984.
- Anwar Samsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III, Cet. Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ashofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Chaudri Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Efendi Rustam, *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Mgistra Insania Press, 2003.
- Fauroni Muhammad, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Hamid, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Pustaka dua, 1999.
- Hajar Al-Hafid Ibnu, *Terjemah Bulughul Maram* (Ibnu Haja Al-Asqalani), Cet.I, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Haryono, *Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta: BP Cipta Jaya, 2003.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalah), Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hendri Anton, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonomi, 2003.
- Ibrahim Abu Sinn, Ahmad, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2011.
- Ja'far A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Surabaya: Gemilang, 2019.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: mandar maju, 1996.
- Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.
- Khakim Abdul, *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.
- K.Lubis Suwardi, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Edisi pertama, Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2012.
- Mas'adi Ghufon A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Munawwir Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia, edisi II*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. I, Jakarta: Griya Media Pratama, 2000.
- Noeng, Mudadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Positivik Rasionalitik Phenomenologik dan Realisme Metaphisik dalam Telaah Studi Teks Penelitian Agama*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Offset Radar Jaya, *Peraturan Upah Minimum Di 27 Provinsi Indonesia Edisi 1993*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Pusat Bahasa DepDikNas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Qordawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Rabbani Perss, 2001.
- Rahman Al-Faruz, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989). h. 361.
- Rahman Afsur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

- Riva'I Veitzhal, *Islamic marketing*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Depok: raja grafindo persada, 2017.
- Rusyd Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid Juz 2*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, tt.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sudjana Eggi, *Islam Fungsional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunarto Achmad dkk, *Terjemahan Shahih Bukhari*, Jilid 7, Semarang: CV. As-Syifah, 1993.
- Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bandar Lampung: pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Sutrisno, *Metodelogi Research Kualitatif*, Bandung: R&D, 2009.
- Sutrisno, Hadi, *Metode Research*, Jakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.
- Syafe'I, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syadily Hasan, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1984.
- Taqiuddin Imam, *Khifayatul Akhyar (Kalangan Orang Saleh)*, Cet. Pertama, Surabaya: Bima Imam, 1994.
- Tika Pambundu, Muhamad, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Yunus Muhammad, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.

Jurnal

- Rohman Abdur, Multi Level Marketing: Analisis Penerapan Akad *Ju'alah* Dalam Multi Level Marketing (MLM), *al-adalah*, Vol. 13 No.2.

Sumber on-line

- Daulay, "Tugas dan Tanggung Jawab Awak Kapal" Wordpress.com, 2012, <https://bukudaulay.wordpress.com/>.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Imigrasi Perubahan Pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20, Dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1999 Tentang Upah Minimum, Tersedia di: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/karyawan-dibawah-10-orang>.

Yaharmas, "ABK-Anak Buah Kapal" Japra Group, 2017, <https://japragroup.wordpress.com/2017/09/11/apa-itu-abk-anak-buah-kapal/>.

